

4. URUSAN PERDAGANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Perdagangan pada tahun 2020 adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta Kelurahan Kalibeyer Kecamatan Mojotengah. Dalam urusan perdagangan, perangkat daerah terkait melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan perdagangan mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu meningkatkan kemandirian daerah serta misi ke-4 yaitu meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata.

a. Alokasi Pendanaan

Guna mendukung urusan perdagangan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasi anggaran sebesar Rp68.671.216.000,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan perdagangan pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp66.574.888.241,00 atau 96,95%. Rincian program, alokasi dan realisasi anggaran pada urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.C.4.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	68.671.216.000,00	66.574.888.241,00	96,95
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	250.000.000,00	231.064.920,00	92,43
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	70.000.000,00	67.314.900,00	96,16
3	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	100.000.000	95.742.000	95,74
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi	68.221.216.000,00	66.162.579.921,00	96,98
5	Program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM)	30.000.000,00	18.186.500,00	60,62

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sepanjang tahun 2020 yang lalu terdapat dua pokok kegiatan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, yaitu operasional dan pengembangan UPT Kemetrolagian, serta pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang strategis di tingkat pasar dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

III.C.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Keseluruhan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ini dilakukan untuk dalam rangka pemberdayaan konsumen, penguatan lembaga perlindungan konsumen, dan peningkatan kapasitas kelembagaan metrologi legal, serta optimalisasi pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.

Adapun tujuan dari berbagai kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian yang telah dilaksanakan antara lain untuk mendukung terciptanya tertib ukur di segala bidang, adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) kemetrologian. Harapannya, dengan dilakukan kegiatan operasional kemetrologian tersebut, dapat membantu konsumen dalam memperoleh pelayanan yang sesuai dengan jumlah yang dikehendaki serta membantu mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha/pedagang terkait penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar yang ada.

Dari alokasi anggaran program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan sebesar Rp250.000.000,00, telah terealisasi sebesar Rp231.064.920,00 atau 92,43%.

2) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Keseluruhan program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan yang telah dilakukan Kabupaten Wonosobo diharapkan dapat mewujudkan kedisiplinan dan ketertiban pedagang kaki lima dan asongan serta menurunkan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan ditempat yang bukan merupakan peruntukannya. Salah satu output dari program tersebut adalah keberadaan *site plan* PKL Wonosobo sebagai salah satu cara menata dan mentertibkan PKL yang ada.

Namun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada tahun 2020, diantaranya adalah kegiatan kemitraan antara PKL dengan institusi/lembaga terkait. Harapannya dengan adanya pembinaan atau pemberdayaan pedagang kaki lima dan asongan, akan mampu menghasilkan hubungan harmonis antara PKL dengan institusi/lembaga terkait sehingga selain pola kemitraan lebih mudah terjalin, juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menciptakan ketertiban umum.

Dari alokasi anggaran program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan sebesar Rp100.000.000,00, dapat terealisasi sebesar Rp95.742.000,00 atau sekitar 95,74%.

3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta interaksi antara kelompok masyarakat dan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian serta mendukung daya dukung nasional agar dapat bersaing secara global.

III.C.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan perekonomian di Wonosobo. Salah satunya adalah dengan menjadikan pembangunan/rehab pasar sebagai prioritas utama dalam program pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, selain itu juga meningkatkan pemanfaatan presentase los/kios pada pasar, dan pemeliharaan ringan pasar agar pemanfaatan pasar bisa lebih optimal.

Peran pasar dalam perekonomian sangatlah vital, bahkan pasar diibaratkan sebagai jantung perekonomian suatu daerah. Hal ini disebabkan karena banyaknya pihak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dengan kegiatan pasar, sehingga dinamis dan lesunya perekonomian suatu daerah dapat tercermin dari keberlangsungan kegiatan di tempat tersebut.

Dari alokasi anggaran program pengembangan sarana dan prasarana ekonomi sebesar Rp68.221.216.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp66.162.579.921,00 atau 96,98%.

4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan efisiensi distribusi perdagangan, sarana dan prasarana penunjang perdagangan sangat diperlukan dalam rangkaian proses peningkatan daya saing suatu produk unggulan. Peran pemerintah daerah diperlukan dalam menjaga stabilitas harga barang di pasar daerah, mengingat struktur inflasi di Indonesia secara nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga-harga komoditi yang terjadi di berbagai daerah. Dengan terciptanya angka inflasi yang rendah dan stabil pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi lain, berbagai permasalahan struktural terkait pengendalian inflasi masih sering terjadi akibat adanya konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, serta kesenjangan informasi harga dan produksi pangan. Hal inilah yang menjadi latar belakang pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mempunyai peran penting untuk menjaga inflasi daerah. Keberadaan tim ini menjadi sangat strategis di tengah semakin besarnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari alokasi anggaran program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp70.000.000,00, dapat terealisasi tahun ini sebesar Rp67.314.900,00 atau 96,16%.

5) Program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM)

Usaha dagang kecil menengah (UDKM) dinilai sebagai salah satu prioritas pembangunan yang terbukti cukup handal dalam menghadapi berbagai gejolak perekonomian yang seringkali terjadi sehingga pemerintah daerah memandang penting keberadaan para pelaku UDKM di Kabupaten Wonosobo.

Perhatian tinggi yang diberikan kepada para pelaku UDKM tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah daerah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Terlebih, UDKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah melalui penciptaan produk-produk hasil industri kreatif yang mampu mendukung sektor pertanian, pariwisata maupun sektor-sektor lainnya.

III.C.4. Urusan Pilihan Perdagangan

Salah satunya, pada tahun 2020, telah dilakukan kegiatan pelatihan pelaku usaha perdagangan di Kelurahan Kalibeber Kecamatan Mojotengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketrampilan, daya saing usaha perdagangan serta memfasilitasi pelaku usaha perdagangan akan pentingnya produk unggulan di suatu daerah.

Dari alokasi anggaran program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKM) sebesar Rp30.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp18.186.500,00 atau 60,62%.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.C.4.2
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	-	0,8	0,96	2	208,33	ST	1
2	Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	-	0,97	0,50	96,37	19274	ST	0,5
3	Persentase kenaikan UDKM	%	25,57	27	4,41	16,33	SR	30
4	Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar	-	0	8	2	25	SR	8
5	Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang	-	20	24	320	1333,33	ST	25
6	Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama	-	0,8	0,18	0	0	SR	0,2
7	Persentase kenaikan negara tujuan ekspor	%	5	12	13,04	108,67	ST	12,50
8	Nilai Ekspor bersih perdagangan (USD)	USD	57,29 jutaUSD	63,6 juta USD	39,51 juta USD	62,12	R	66,7 juta USD
9	Persentase los/kios yang dimanfaatkan	%	90	80	85,97	107,46	ST	90,00
10	Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi	%	80	68	89	130,88	ST	70,00
11	Penurunan pedagang kaki lima	DTD	0,5	1,6	1,1	68,75	S	2,00

III.C.4. Urusan Pilihan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya							

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja program urusan perdagangan sepanjang tahun 2020 yang lalu tercermin sebagai berikut;

- Terdapat 11 Indikator Kinerja Program Urusan Perdagangan,
- Realisasi kinerja program kategori sangat tinggi sebanyak 6 indikator,
- Realisasi kinerja program kategori sedang, rendah dan sangat rendah sebanyak 5 indikator (mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun kemarin, yang hanya sejumlah 3 indikator)

Tak bisa dipungkiri, Pandemi Covid-19 sepanjang akhir tahun 2019 hingga saat ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah karena semakin terbatasnya ruang gerak yang normal dalam melakukan kegiatan produksi. Terlebih, pandemi ini membawa implikasi tekanan terhadap terganggunya kegiatan ekonomi maupun investasi. Dan jelas, perlambatan pertumbuhan ekonomi ini menghadirkan tantangan serta mendorong para pelaku usaha serta sinergitas pemerintah daerah untuk mengambil sejumlah langkah dan strategi yang tepat, termasuk mencari peluang-peluang baru.

III.C.4. **Urusan Pilihan Perdagangan**

Pencapaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Wonosobo yang masih memerlukan perhatian khusus ditunjukkan oleh indikator persentase kenaikan UDKM dengan tingkat capaian 16,33% pada tahun 2020, menurun 9,24% dari tahun 2019. Dalam hal ini, diperlukan upaya pembinaan dan pelatihan khususnya terkait dengan pemahaman regulasi perdagangan serta memberikan kesadaran kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan manajemen perusahaan dalam berkontribusi pengembangan UDKM.

Indikator lain yang memerlukan perhatian adalah nilai ekspor bersih perdagangan (USD), dimana pada tahun 2020 capaiannya adalah 39,51 juta USD, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,29 juta USD dan masih di bawah target sebesar 63,6 juta USD. Penurunan nilai ekspor ini di indikasikan karena adanya kendala pada mobilitas operasional ekonomi, juga kondisi perekonomian dunia yang belum menentu karena ada pandemi covid 19. Namun pada tahun 2021 mendatang, terdapat optimisme bahwa nilai ekspor akan meningkat, yang ditandai dengan adanya peningkatan indikator persentase kenaikan tujuan ekspor sebesar 13,04%, melampaui 1,04% dari target pada tahun 2020.

Indikator berikutnya yang memerlukan perhatian khusus adalah terkait penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya. Tahun 2020 capaiannya adalah 1,1%, meningkat 0,6% dari tahun sebelumnya, walaupun masih dibawah target sebesar 1,6. Dalam hal ini, pembinaan dan pengawasan sektor formal dan informal, pasar tradisional, pedagang kaki lima ataupun pedagang asongan harus terus-menerus dilakukan, dengan harapan kedisiplinan dan ketertiban PKL akan semakin meningkat dan mereka akan berjualan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya.

Melihat capaian-capaian indikator pada tahun 2020 tersebut di atas dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, masih terdapat beberapa indikator yang perlu diakselerasi seperti persentase kenaikan UDKM, rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama, penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya, serta nilai ekspor bersih perdagangan. Akselerasi pencapaian ini dimaksudkan agar target akhir tahun 2021 dapat terpenuhi dengan baik.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan koperasi dan UKM Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Perdagangan, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu :

Tabel III.C.4.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Perdagangan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih terbatasnya SDM dan anggaran untuk menuju UML yang mandiri menyebabkan pelayanan dan kegiatan Tera/Tera Ulang masih dibawah standar.	Melakukan koordinasi intensif dengan OPD yang bersangkutan terkait kepegawaian dan anggaran.
2.	Beberapa barang komoditas di pasar tidak memiliki distributor, seperti bawang putih dan ditemukan gas LPG 3 kg yang melebihi HET di pelosok desa.	Melakukan koordinasi secara intensif dengan agen distributor LPG dan OPD terkait.
3.	Pembangunan Pasar yang terkendala cuaca dan situasi pandemi.	Memaksimalkan tenaga kerja yang tersedia, serta melakukan penambahan tenaga kerja yang berasal dari zona hijau dan disediakan fasilitas kesehatan oleh kontraktor pelaksana.
4.	Belum selesainya penulusuran dan penarikan sertifikat.	Melakukan penulusuran dan penarikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mencari informasi terkait sertifikat dari pihak terkait.
5.	Keterbatasan anggaran disebabkan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan terkait penanganan Covid-19.	Program yang mengalami pergeseran anggaran, dianggarkan kembali di tahun berikutnya.